PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
2025, Vol. 3, No. 5, 443-456
https://doi.org/10.55681/primer.v3i5.435

Analisis Kemandirian Fiskal dan Tantangan Optimalisasi Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Serang Tahun 2024

Rehan Akmal[1], Laeli Nur Khanifah[2], Seli Novia[3], Raisha Putri[4], Nurhaeni[5], Nela Wahdatin[6]
[1]Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
Corresponding Author's e-mail : 6670240031@student.untirta.ac.id, khanifah92@untirta.ac.id, 6670240067@student.untirta.ac.id, raishaptr111@gmail.com, haeninur338@gmail.com, nelawahdatin03@gmail.com

e-ISSN: 2985-7996

Article History:
Received: 14-09-2025
Revised: 03-10-2025
Accepted: 28-10-2025

© 2025, The Author(s)

Abstrak : *Kemandirian fiskal merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik melalui sumber pendapatan yang berada dalam kewenangannya. Kota Serang pada Tahun 2024 masih menunjukkan struktur fiskal yang ditandai oleh dominasi transfer pemerintah pusat dibandingkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan secara mandiri masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kemandirian fiskal dan tantangan optimalisasi PAD dalam pengelolaan APBD Kota Serang Tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental tunggal. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur yang dianalisis menggunakan perspektif good governance dan value for money. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer, sementara realisasi PAD, khususnya pada komponen pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, belum mencerminkan kapasitas penerimaan yang sebanding dengan potensi fiskal yang tersedia. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah belum optimal dan masih terdapat keterbatasan dalam pengembangan basis penerimaan daerah. Di sisi lain, pengelolaan APBD Kota Serang telah mengakomodasi prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta value for money melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan, tetapi juga oleh kemampuan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ekonomi lokal secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kemandirian fiskal memerlukan optimalisasi PAD melalui perbaikan tata kelola, digitalisasi administrasi pendapatan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan daerah.*

Kata Kunci : *Kemandirian Fiskal; Pendapatan Asli Daerah; Desentralisasi Fiskal; APBD; Kapasitas Fiskal.*

How to cite: Akmal, R., Laeli Nur Khanifah, Seli Novia, Raisha Putri, Nurhaeni, & Nela Wahdatin. (2025). Analisis Kemandirian Fiskal dan Tantangan Optimalisasi Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Serang Tahun 2024. *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *3*(5), 443–456. https://doi.org/10.55681/primer.v3i5.435

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Krisis kemandirian fiskal daerah memperlihatkan kontradiksi antara pelimpahan kewenangan fiscal dan realitas ketergantungan yang masih tinggi pada transfer pusat (Arifuddin et al., 2021; Mahardika & Fauzan, 2022; Musfirati & Sugiyanto, 2021; Nurjanah et al., 2020; Rahman & Laere, 2021). Fenomena ini menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal belum sepenuhnya diikuti kapasitas daerah dalam menggali sumber pendapatan mandiri. Ketimpangan tersebut tercermin dari dominasi dana perimbangan dalam struktur pendapatan daerah yang terus berulang di berbagai wilayah (Admaja et al., 2021; Nurvaliza & Putra, 2024). Situasi ini memperlihatkan kegagalan optimalisasi PAD sebagai instrumen utama penguatan fiskal daerah.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemandirian fiskal tidak sekadar persoalan angka, tetapi berkaitan erat dengan kapasitas struktural pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi lokal (Mahardika & Fauzan, 2022). Keterbatasan kemampuan menggali PAD sering kali berakar pada lemahnya inovasi kebijakan fiskal serta rendahnya efektivitas pengelolaan potensi daerah (Musfirati & Sugiyanto, 2021; Nurvaliza & Putra, 2024). Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer memperlihatkan bahwa struktur pendapatan daerah belum mengalami transformasi signifikan (Admaja et al., 2021). Fenomena ini menegaskan bahwa keuangan fiskal daerah masih menghadapi tantangan serius dalam praktik implementasinya.

Permasalahan utama penelitian ini terletak pada masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal Kota Serang yang tercermin dari dominasi sumber pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dibandingkan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD. Pada tahun 2024, krisis kemandirian fiskal masih menjadi persoalan yang dihadapi Kota Serang. Pemberitaan RRI (2024) mengungkapkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah hanya berada pada kisaran 20 persen atau sekitar Rp300 miliar, sedangkan sekitar 80 persen sumber pendapatan masih berasal dari transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik masih sangat bergantung pada dukungan fiskal eksternal. Tingginya proporsi transfer memperlihatkan bahwa sumber pendapatan lokal belum berkembang secara optimal untuk menopang kebutuhan anggaran daerah secara mandiri (Mahardika & Fauzan, 2022). Situasi ini semakin memperkuat indikasi terjadinya krisis kemandirian fiskal di Kota Serang (RRI, 2024).

Ketergantungan fiskal yang tinggi tersebut turut memengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Pemberitaan RRI (2024) menjelaskan bahwa upaya peningkatan PAD bahkan melibatkan camat dan lurah untuk mendorong pencapaian target pendapatan daerah. Langkah tersebut menunjukkan adanya tekanan yang cukup besar untuk meningkatkan kapasitas penerimaan daerah di tengah keterbatasan sumber pendapatan yang tersedia. Di sisi lain, kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa penguatan fiskal masih banyak bertumpu pada pendekatan administratif dibanding pengembangan basis ekonomi daerah yang berkelanjutan (Musfirati & Sugiyanto, 2021).

Penelitian mengenai kemandirian fiskal telah banyak dilakukan. Hanifah et al. (2025) menyoroti strategi optimalisasi PAD melalui intensifikasi pajak, digitalisasi pelayanan, serta pemanfaatan aset daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Triyassari & Sambharakreshna (2024) menemukan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah meskipun efektivitas PAD tergolong tinggi. Susilo et al. (2024) membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal daerah. Sementara itu, Sa'bani et al. (2025) menekankan pentingnya kapasitas

kelembagaan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Hasanah et al. (2025) juga menunjukkan bahwa seluruh komponen PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penguatan kemandirian fiskal daerah.

Melihat perkembangan kajian kemandirian fiskal selama ini lebih banyak menempatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator keberhasilan desentralisasi fiskal tanpa menguraikan secara mendalam kondisi krisis fiskal yang muncul akibat tingginya ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. Akibatnya, pemahaman mengenai hubungan antara dominasi transfer, keterbatasan kapasitas pendapatan lokal, dan lemahnya ruang fiskal daerah masih belum berkembang secara komprehensif (Mahardika & Fauzan, 2022). Kesenjangan tersebut membuka kebutuhan akan kajian yang berfokus pada realitas fiskal Kota Serang. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis krisis kemandirian fiskal melalui keterkaitan ketergantungan transfer pusat dan tantangan optimalisasi PAD dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah di Kota Serang secara berkelanjutan.

Penelitian ini penting dilakukan karena kondisi kemandirian fiskal Kota Serang masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pemerintah pusat, sementara kemampuan menghasilkan pendapatan daerah secara mandiri belum berkembang optimal. Situasi tersebut berpotensi membatasi kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang terus meningkat (Mahardika & Fauzan, 2022). Kajian mengenai krisis kemandirian fiskal diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai hambatan dalam penguatan sumber pendapatan daerah. Penelitian ini juga relevan untuk mengidentifikasi tantangan optimalisasi PAD sebagai sumber penerimaan utama yang dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan pusat (Musfirati & Sugiyanto, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada satu pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana krisis kemandirian fiskal dan tantangan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah memengaruhi kemampuan Kota Serang dalam memperkuat kapasitas fiskalnya. Fokus tersebut dipilih karena tingginya ketergantungan pada transfer pusat masih menjadi persoalan utama dalam struktur keuangan daerah (Nurjanah et al., 2020). Penelitian ini bertujuan menganalisis krisis kemandirian fiskal Kota Serang serta mengidentifikasi berbagai tantangan optimalisasi PAD yang memengaruhi penguatan kapasitas keuangan daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian keuangan fiskal daerah sekaligus menjadi masukan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental tunggal (single instrumental case study) yang mengacu pada kerangka metodologi Creswell (2014). Menurut Creswell dan Poth (2018), studi kasus instrumental tunggal fokus pada satu isu atau perhatian teoretis tertentu, di mana peneliti memilih satu kasus terikat untuk mengilustrasikan dan mendalami isu tersebut secara kontekstual. Dalam penelitian ini, pengelolaan APBD Kota Serang Tahun 2024 diposisikan sebagai kasus instrumen eksperimentasi. Lokus ini digunakan sebagai sarana analitis untuk membedah problematik yang lebih makro, yaitu krisis kemandirian fiskal dan dilema ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat.

Rasionalisasi pemilihan desain ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami dinamika pengelolaan anggaran secara mendalam, utamanya fenomena ketidakefektifan pencapaian target pendapatan di daerah otonom baru. Sejalan dengan pandangan

mengenai studi kasus, metode ini memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata, seperti proses birokrasi dan tata kelola keuangan publik. Melalui pembatasan kasus pada tahun anggaran 2024, penelitian ini secara spesifik menguji realitas pelaksanaan anggaran pasca-pandemi di Kota Serang, yang dicirikan oleh ketimpangan antara target pendapatan asli daerah dengan realisasi di lapangan.

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini dihimpun secara komprehensif melalui teknik triangulasi untuk menjaga validitas dan reliabilitas temuan kelembagaan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) bersama informan kunci (key informants), salah satunya adalah Kasubbid Penyusunan APBD BPKAD Kota Serang, guna menjaring data langsung mengenai evaluasi forum ATOM dan kendala teknis keterbukaan informasi. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan secara verbatim dari dokumen resmi yang disediakan mencakup data agregat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) serta dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Serang Tahun 2024.

Prosedur analisis data dilakukan secara sirkular mengalir mengadopsi model data analysis spiral milik Creswell (2014). Tahapan analisis dimulai dari pengorganisasian seluruh berkas mentah hasil wawancara dan transkrip dokumentasi ke dalam basis data digital terstruktur. Langkah berikutnya melibatkan proses membaca keseluruhan data secara berulang (memoing) untuk menangkap esensi substantif, yang dilanjutkan dengan pengodean (coding) unit-unit makna yang relevan dengan indikator Value for Money (VFM). Kode-kode tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema besar, seperti efektivitas pendapatan dan hambatan struktural PAD, sebelum akhirnya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif-analitis yang logis (Creswel 2014).

Guna menjamin keabsahan data (trustworthiness) dan meminimalkan bias interpretatif, peneliti menerapkan teknik pemeriksaan keabsahan data yang ketat. Berdasarkan rekomendasi Miles dkk. (2020), kepastian kualitas data kualitatif dicapai melalui triangulasi sumber (membandingkan persepsi pejabat BPKAD dengan data realisasi anggaran tertulis) dan triangulasi teknik (mengonfirmasi hasil wawancara dengan dokumen KUA Kota Serang 2024). Selain itu, peneliti melakukan member checking secara informal dengan mengonfirmasikan kembali transkrip narasi kepada informan guna memastikan bahwa pemaknaan yang dituliskan telah sesuai dengan realitas institusional yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Serang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kemandirian Fiskal dan Ketergantungan Transfer Pusat Kota Serang Tahun 2024

Kemandirian fiskal Kota Serang pada tahun 2024 masih menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Komposisi pendapatan yang tercantum dalam APBD menunjukkan bahwa sumber penerimaan daerah masih didominasi oleh dana yang berasal dari pemerintah pusat (RRI, 2024). Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menempati porsi yang lebih besar dalam mendukung kebutuhan pembiayaan daerah (Shobiha et al., 2025). Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa kemampuan fiskal Kota Serang masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Temuan ini sejalan dengan penelitian Admaja et al. (2021) yang menjelaskan bahwa struktur penerimaan daerah dapat digunakan untuk melihat tingkat kemampuan fiskal serta ketergantungan daerah pada sumber pendanaan eksternal. Berikut penulis sajikan data yang menggambarkan kondisi kemandirian fiskal dan ketergantungan transfer pusat

Kota Serang tahun 2024. Berikut penulis sajikan tabel data yang memperlihatkan struktur ketergantungan fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Serang.

Tabel 1. Rincian Transfer ke Daerah (TKKD) Kota Serang Tahun 2024

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
TRANSFER KE DAERAH	**1.011,63 M**	**1.010,71 M**	**99.91**
Dana Bagi Hasil	**77,02 M**	**76,98 M**	**99.94**
DBH Cukai Hasil Tembakau	0,01 M	0,00 M	0.00
DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	0,00 M	0,00 M	100.00
DBH PPh Pasal 21	72,67 M	72,67 M	100.00
DBH PPh Pasal 25/29 OP	2,18 M	2,18 M	100.00
DBH SDA Kehutanan - PSDH	0,03 M	0,03 M	100.00
DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	0,00 M	0,00 M	100.00
DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	0,11 M	0,11 M	100.00
DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	0,04 M	0,04 M	100.00
DBH SDA Perikanan	1,99 M	1,98 M	100.00
Dana Alokasi Umum	**652,28 M**	**652,28 M**	**100.00**
Dana Alokasi Umum	493,61 M	493,61 M	100.00
Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	40,60 M	40,60 M	100.00
Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	2,23 M	2,23 M	100.00
Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	91,11 M	91,11 M	100.00
Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan	13,40 M	13,40 M	100.00
Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	11,28 M	11,28 M	100.00
Dana Alokasi Khusus Fisik	**34,30 M**	**33,80 M**	**98.55**
Dana Alokasi Khusus Penugasan	34,30 M	33,80 M	98.55
Dana Insentif Daerah	**7,50 M**	**7,50 M**	**100.00**
Dana Insentif Daerah	7,50 M	7,50 M	100.00
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	**249,53 M**	**249,35 M**	**99.84**
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	6,33 M	6,33 M	100.00
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	21,11 M	21,11 M	100.00
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	7,95 M	7,68 M	97.87
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini	9,05 M	9,03 M	99.75
Dana Bantuan Operasional Sekolah	102,50 M	102,50 M	100.00
Dana Fasilitasi Penyaluran Modal	0,30 M	0,30 M	100.00
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,20 M	0,20 M	100.00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,12 M	0,12 M	100.00
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	2,78 M	2,78 M	100.00
Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	89,62 M	89,62 M	100.00
TOTAL TKDD	**1.011,63 M**	**1.010,71 M**	**99**

Sumber: (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024)

Data yang diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2024) memperlihatkan bahwa transfer pusat ke daerah di Kota Serang masih berasal dari pemerintah pusat, terlihat dari total transfer mencapai Rp1.011,63 miliar dengan realisasi hampir 100 persen. Angka ini jauh lebih besar dibanding kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri sehingga membuat posisi keuangan daerah sangat bergantung pada pusat. Besarnya transfer ini terjadi karena PAD yang rendah belum mampu menutup kebutuhan belanja daerah sehingga kekurangannya harus dipenuhi melalui dana seperti Dana Alokasi Umum sebesar Rp652,28 miliar yang menjadi sumber utama pembiayaan (Keuangan, 2024). Kondisi ini menimbulkan krisis kemandirian fiskal karena daerah tidak memiliki kekuatan finansial sendiri untuk menjalankan pembangunan tanpa bantuan pusat (Mahardika & Fauzan, 2022).

Struktur transfer tersebut juga memperlihatkan bahwa sebagian besar dana yang diterima bukan sepenuhnya bebas digunakan oleh daerah, melainkan sudah diarahkan untuk kebutuhan tertentu seperti pendidikan dan kesehatan, misalnya BOS Rp102,50 miliar dan tunjangan guru Rp89,62 miliar (Keuangan, 2024). Hal ini membuat pemerintah daerah tidak leluasa mengatur prioritas anggaran sesuai kebutuhan lokal karena sebagian besar dana sudah "diatur dari atas" (Musfirati & Sugiyanto, 2021). Di sisi lain, dana yang bisa mendorong kemandirian seperti Dana Insentif Daerah hanya Rp7,50 miliar sehingga dampaknya sangat kecil. Situasi ini semakin memperjelas bahwa ketergantungan pada transfer pusat tidak hanya besar secara jumlah, tetapi juga membatasi ruang gerak daerah sehingga memperkuat terjadinya krisis kemandirian fiskal. Berikut penulis sajikan data tabel yang memperlihatkan kondisi pendapatan dan belanja daerah secara lebih komprehensif.

Tabel 2. Struktur Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2024

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	**1.560,00 M**	**465,55 M**	**29.84**
PAD	**294,92 M**	**77,89 M**	**26.41**
Pajak Daerah	220,38 M	58,80 M	26.68
Retribusi Daerah	57,01 M	15,16 M	26.59
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,43 M	0,00 M	0.00
Lain-Lain PAD yang Sah	16,10 M	3,93 M	24.40
TKDD	**1.037,75 M**	**329,22 M**	**31.72**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.037,75 M	329,22 M	31.72
Pendapatan Lainnya	**227,33 M**	**58,45 M**	**25.71**
Pendapatan Transfer Antar Daerah	227,33 M	58,45 M	25.71
Belanja Daerah	**1.603,62 M**	**346,88 M**	**21.63**
Belanja Pegawai	**770,92 M**	**222,36 M**	**28.84**
Belanja Pegawai	770,92 M	222,36 M	28.84
Belanja Barang dan Jasa	**577,10 M**	**109,25 M**	**18.93**
Belanja Barang dan Jasa	577,10 M	109,25 M	18.93
Belanja Modal	**162,95 M**	**11,87 M**	**7.29**
Belanja Modal	162,95 M	11,87 M	7.29
Belanja Lainnya	**92,65 M**	**3,40 M**	**3.67**
Belanja Subsidi	0,15 M	0,00 M	0.00
Belanja Hibah	76,87 M	3,40 M	4.43
Belanja Bantuan Sosial	8,13 M	0,00 M	0.00
Belanja Tidak Terduga	7,50 M	0,00 M	0.00
Pembiayaan Daerah	**43,61 M**	**0,00 M**	**0.00**
Penerimaan Pembiayaan Daerah	**48,61 M**	**16,11 M**	**33.15**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16,11 M	16,11 M	100.00
Pencairan Dana Cadangan	32,50 M	0,00 M	0.00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**5,00 M**	**0,00 M**	**0.00**
Penyertaan Modal Daerah	5,00 M	0,00 M	0.00

Sumber: (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024)

Data yang diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2024) menunjukkan adanya masalah atas struktur pendapatan dan belanja Kota Serang. Dari target pendapatan Rp1.560 miliar, yang benar-benar masuk hanya sekitar Rp465,55 miliar atau sekitar 30 persen saja. Artinya, uang yang direncanakan tidak berhasil dikumpulkan sesuai target. Pendapatan asli daerah juga sangat kecil, hanya Rp77,89 miliar dari target hampir Rp295 miliar, jadi daerah belum mampu menggali sumber uangnya sendiri. Sementara itu, uang dari pemerintah pusat justru lebih besar, yaitu Rp329,22 miliar, sehingga daerah lebih bergantung pada pusat daripada pada kemampuan sendiri (Keuangan, 2024). Di sisi lain, kebutuhan belanja tetap besar sehingga terjadi ketidakseimbangan antara uang masuk dan uang yang harus dikeluarkan.

Jika dilihat lebih dalam, PAD yang kecil itu juga karena pajak dan retribusi tidak maksimal. Pajak daerah hanya terkumpul Rp58,80 miliar dari target Rp220,38 miliar, dan retribusi hanya Rp15,16 miliar dari target Rp57,01 miliar (Keuangan, 2024). Bahkan pendapatan dari pengelolaan aset daerah tidak menghasilkan apa-apa, padahal ada targetnya, ini menunjukkan pengelolaannya belum baik. Di sisi pengeluaran, sebagian besar uang justru habis untuk belanja pegawai, yaitu Rp222,36 miliar, bukan untuk pembangunan atau hal yang lebih produktif (Keuangan, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa keuangan daerah belum sehat karena pemasukan kecil tetapi pengeluaran tetap besar.

Kondisi keuangan Kota Serang tahun 2024 masih menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal dan tingginya ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. Rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD menyebabkan kebutuhan pembiayaan daerah masih bergantung pada sumber pendapatan dari luar daerah (Admaja et al., 2021). Situasi tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas fiskal Kota Serang belum berkembang secara optimal untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Arifuddin et al., 2021). Keterbatasan kontribusi pendapatan lokal juga menunjukkan bahwa penguatan sumber penerimaan daerah masih menjadi tantangan utama (Nurvaliza & Putra, 2024). Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa sebagian

besar daerah masih menghadapi hambatan dalam mencapai kemandirian keuangan yang kuat (Nurjanah et al., 2020).

Kondisi Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD Kota Serang Tahun 2024

Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan struktur APBD Kota Serang Tahun 2024 menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Berdasarkan KUA Kota Serang Tahun 2024, total pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,31 triliun yang terdiri atas PAD sebesar Rp273,10 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,03 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Namun, realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun anggaran hanya mencapai sekitar Rp465,55 miliar atau sekitar 30 persen dari target yang ditetapkan. Kesenjangan antara target dan realisasi tersebut mencerminkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah serta tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Mahardika & Fauzan, 2022).

PAD sebagai indikator utama kemandirian fiskal juga menunjukkan capaian yang belum optimal. Dari target sebesar Rp294,76 miliar, realisasi PAD hanya mencapai Rp77,89 miliar atau kurang dari 30 persen. Pajak daerah sebagai sumber utama PAD terealisasi sebesar Rp58,80 miliar dari target Rp220,38 miliar atau sekitar 26,7 persen. Rendahnya realisasi tersebut menunjukkan bahwa potensi fiskal daerah belum tergarap secara maksimal akibat keterbatasan kapasitas pemungutan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta perlunya evaluasi regulasi daerah (Pratama et al., 2025).

Kondisi serupa juga terlihat pada retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Meskipun berbagai sumber penerimaan telah ditetapkan dalam PPAS Kota Serang Tahun 2024, kontribusinya terhadap PAD masih relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan aset daerah dan BUMD belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah, meskipun KUA 2024 telah menekankan pentingnya optimalisasi aset dan usaha daerah sebagai sumber penerimaan alternatif.

Struktur pendapatan daerah yang masih didominasi oleh dana transfer semakin menunjukkan rendahnya tingkat kemandirian fiskal Kota Serang. Dari total realisasi pendapatan sebesar Rp465,55 miliar, PAD hanya berkontribusi kurang dari 17 persen, sedangkan pendapatan transfer mencapai sekitar 70 persen. Sebagian besar dana transfer tersebut bersifat earmarked sehingga ruang fiskal pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan menjadi terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat dan memerlukan upaya optimalisasi PAD secara berkelanjutan (Musfirati & Sugiyanto, 2021).

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2024

Pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pencapaian target pendapatan daerah Kota Serang Tahun 2024 dapat ditinjau melalui indikator akuntabilitas yang menekankan kewajiban pemerintah menyampaikan capaian kinerja secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Realisasi pendapatan yang belum mencapai target menunjukkan perlunya evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan penerimaan daerah (Admaja et al., 2021). Dalam konteks otonomi daerah, keberhasilan pencapaian target pendapatan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik dan menjalankan fungsi fiskalnya secara efektif (Arifuddin et al., 2021; Rahman & Laere, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbid Penyusunan APBD BPKAD Kota Serang, pertanggungjawaban APBD dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang melibatkan BPKAD, Bapenda, dan Baperrinda. Informasi APBD disampaikan melalui website resmi dan PPID Kota Serang, sedangkan evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan secara berkala melalui forum ATOM. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya transparansi dan pengawasan terhadap capaian pendapatan serta kendala pelaksanaan program pemerintah daerah (Admaja et al., 2021; Musfirati & Sugiyanto, 2021).

Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan juga tercermin dalam KUA Kota Serang Tahun 2024 yang mengarahkan kebijakan pada optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (KUA, 2024). Upaya tersebut dilakukan melalui perbaikan tata kelola pendapatan, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan pengembangan sumber penerimaan baru guna memperkuat kapasitas keuangan daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Nurjanah et al., 2020; Nurvaliza & Putra, 2024).

Meskipun demikian, jika ditinjau dari perspektif akuntabilitas dalam good governance, capaian pendapatan yang masih berada di bawah target menunjukkan bahwa pengelolaan PAD perlu terus diperkuat. Akuntabilitas tidak hanya menuntut pelaporan administratif, tetapi juga kemampuan pemerintah menghasilkan perbaikan kinerja fiskal yang nyata dan berkelanjutan (Mardiasmo, 2009; Admaja et al., 2021; Mahardika & Fauzan, 2022).

Keterbukaan Informasi Pengelolaan APBD Kota Serang Tahun 2024

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama good governance yang menekankan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Transparansi berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Santoso et al., 2024; Chairunnisa et al., 2023; Sherly et al., 2025).

KUA Kota Serang Tahun 2024 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, efektif, efisien, bertanggung jawab, dan partisipatif. Untuk mendukung keterbukaan informasi, Pemerintah Kota Serang menyediakan berbagai media akses informasi seperti website resmi, PPID, dan JDIH Kota Serang sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi terkait proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD (Firanti & Biduri, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah daerah juga membuka layanan permohonan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen tertentu. Meskipun masih terdapat kendala teknis dalam publikasi dokumen APBD secara digital karena ukuran dokumen yang besar, hambatan tersebut lebih bersifat teknis daripada substantif sehingga tidak mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan keterbukaan informasi publik (Santoso et al., 2024).

Secara keseluruhan, pengelolaan APBD Kota Serang Tahun 2024 telah menunjukkan penerapan prinsip transparansi melalui penyediaan akses informasi dan layanan publik yang mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini sejalan dengan konsep good governance yang menempatkan keterbukaan sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2009).

Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Optimalisasi Pendapatan Daerah

Partisipasi merupakan salah satu prinsip good governance yang menekankan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan (Mulanda & Adnan, 2023). Dalam pengelolaan keuangan daerah, partisipasi tercermin melalui keterlibatan pemerintah daerah, perangkat daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pencapaian target pendapatan daerah (Santoso et al., 2024; Sulistiawan et al., 2022).

Berdasarkan hasil wawancara, penyusunan APBD Kota Serang dilakukan melalui tahapan Musrenbang, RKPD, KUA-PPAS, RKA, hingga RAPBD yang melibatkan berbagai perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan melalui koordinasi antara BPKAD, Bapenda, dan Baperrida sehingga proses penganggaran dapat berjalan secara terintegrasi (Purwaningsih, 2022).

Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui Musrenbang sebagai wadah penyampaian aspirasi pembangunan yang menjadi dasar penyusunan RKPD. Selain itu, KUA Kota Serang Tahun 2024 juga menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan daerah serta pengembangan ekonomi lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah, meskipun efektivitasnya masih perlu diperkuat untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat (Inzany et al., 2022; Kamala et al., 2025; Mardiasmo, 2009).

Pengelolaan Sumber Daya Fiskal Daerah secara Ekonomis

Dalam perspektif Value for Money, pengelolaan sumber daya fiskal yang ekonomis menekankan kemampuan pemerintah daerah mengelola potensi fiskal secara efisien dan berkelanjutan. Struktur pendapatan Kota Serang Tahun 2024 yang masih didominasi dana transfer menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya ditopang oleh sumber pendapatan lokal sehingga tingkat kemandirian fiskalnya masih relatif rendah (Amalyah & Suriadi, 2025).

Optimalisasi PAD menjadi strategi penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui perluasan basis penerimaan, peningkatan kualitas administrasi perpajakan, pengurangan kebocoran penerimaan, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara lebih produktif (Pratista et al., 2025). Digitalisasi administrasi pendapatan, penguatan kapasitas aparatur, dan modernisasi tata kelola fiskal juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah (Kamala et al., 2025).

Selain itu, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer berpotensi mengurangi insentif daerah dalam mengembangkan sumber pendapatan baru. Oleh karena itu, optimalisasi aset daerah, penguatan regulasi pendapatan, dan pengembangan objek pendapatan baru menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Amalyah & Suriadi, 2025; Kamala et al., 2025; Pratista et al., 2025).

Pemanfaatan Anggaran Daerah dalam Mendukung Pembangunan Daerah

Pemanfaatan anggaran daerah merupakan aspek penting dalam konsep Value for Money karena berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah mengubah sumber daya fiskal menjadi manfaat pembangunan bagi masyarakat. Efisiensi tidak hanya diukur dari tingkat realisasi anggaran, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan output pembangunan yang sebanding dengan sumber daya yang digunakan (Anjani & Latrini, 2025; Aulia et al., 2026).

Efisiensi penggunaan APBD memerlukan keseimbangan antara kebutuhan operasional pemerintahan dan belanja pembangunan yang produktif. Alokasi anggaran yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan penguatan ekonomi daerah memiliki dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat dibandingkan belanja rutin pemerintahan (Susilo et al., 2024; Kamala et al., 2025).

Selain itu, efisiensi anggaran bergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran. Penguatan sistem pengendalian internal, koordinasi antarlembaga, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas penggunaan sumber daya publik sehingga APBD dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pembangunan daerah (Aulia et al., 2026; Susilo et al., 2024).

Pencapaian Target Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Serang Tahun 2024

Dalam perspektif Value for Money, efektivitas diukur dari kemampuan pemerintah daerah mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Data menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Kota Serang Tahun 2024 hanya mencapai sekitar 29,84% dari target yang direncanakan, sehingga kinerja pengumpulan pendapatan daerah masih tergolong belum efektif.

Rendahnya efektivitas terutama disebabkan oleh capaian PAD yang hanya mencapai sekitar 26,41% dari target. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber utama PAD juga menunjukkan realisasi yang masih rendah, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum memberikan kontribusi yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi fiskal daerah belum dikelola secara optimal dan masih diperlukan perbaikan dalam perencanaan serta pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah (Pratama & Handayani, 2023; Sari & Ramadhan, 2024).

Rendahnya capaian PAD berdampak pada tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan utama daerah. Oleh karena itu, perbaikan basis data perpajakan, optimalisasi sumber pendapatan, dan penyusunan target yang lebih realistis menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD di masa mendatang (Halim & Kusuma, 2023; Wulandari & Saputra, 2025).

Krisis Kemandirian Fiskal dan Tantangan Optimalisasi Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2024

Struktur pendapatan Kota Serang Tahun 2024 menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dari total realisasi pendapatan daerah, kontribusi PAD masih relatif rendah dibandingkan pendapatan transfer, sehingga mencerminkan kondisi kemandirian fiskal yang belum kuat (Mahardika & Fauzan, 2022).

Rendahnya PAD dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya inovasi fiskal daerah, pengelolaan aset daerah yang belum produktif, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta perlunya penguatan regulasi daerah. Kondisi tersebut menyebabkan ruang fiskal pemerintah daerah menjadi terbatas dan mengurangi fleksibilitas dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal (Musfirati & Sugiyanto, 2021).

Ditinjau dari perspektif good governance, tantangan tersebut berkaitan dengan aspek efektivitas, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kemandirian fiskal melalui digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi, optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan

kepatuhan wajib pajak, serta pengembangan sumber-sumber PAD yang lebih produktif dan berkelanjutan (Andilolo et al., 2025; Mardiasmo, 2009).

KESIMPULAN

Kemandirian fiskal Kota Serang pada Tahun 2024 masih dihadapkan pada struktur pendapatan daerah yang didominasi oleh transfer pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah belum mampu memberikan dukungan yang proporsional terhadap kebutuhan pembiayaan daerah. Rendahnya capaian penerimaan pada sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan bahwa kapasitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan lokal belum sepenuhnya mampu mengonversi potensi ekonomi daerah menjadi penerimaan fiskal yang optimal. Kondisi tersebut mencerminkan adanya keterbatasan ruang fiskal daerah dalam menopang pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang bertumpu pada kemampuan keuangan daerah sendiri. Ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan eksternal juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kapasitas keuangan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Penguatan kapasitas fiskal daerah berkaitan erat dengan efektivitas tata kelola pendapatan, kualitas kelembagaan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang berada dalam kewenangannya. Akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan prinsip value for money menjadi fondasi penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena berpengaruh terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendapatan daerah. Optimalisasi basis pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah yang produktif, penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah, serta pengembangan sistem administrasi pendapatan berbasis teknologi menjadi aspek yang relevan dalam meningkatkan kapasitas penerimaan daerah. Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kemandirian fiskal tidak hanya berkaitan dengan peningkatan nominal pendapatan, tetapi juga dengan kemampuan institusional dalam membangun struktur penerimaan daerah yang memiliki daya dukung terhadap keberlanjutan fiskal dan penyelenggaraan otonomi daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kota Serang, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, yang telah memberikan dukungan serta memfasilitasi pelaksanaan penelitian. Apresiasi yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada para informan penelitian yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga dalam proses pengumpulan data. Para penulis turut menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing dan seluruh sivitas akademika Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas bimbingan, arahan, serta dukungan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Selain itu, para penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan penulis serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan, masukan, dan dukungan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dan

DAFTAR PUSTAKA

Admaja, A., Anggraini, D., Larasati, M., Cahyanti, N. D., & Wasil, M. (2021). Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung periode 2014–2018. Journal of Regional Economics Indonesia, 2(2), 66–77.

Amalyah, D. R., & Suriadi, I. (2025). Dinamika pendapatan asli daerah dan transfer fiskal terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Lombok tahun 2015–2024. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 25(2), 299–311.

Andilolo, O. P., Alamsa, & Septiyana, S. (2025). Analisis strategi pengelolaan pendapatan asli daerah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi Kota Tarakan tahun 2019–2023. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI), 5(2), 233–256.

Anjani, D. G. N., & Latrini, M. Y. (2025). The influence of regional own-source revenue and balancing funds on capital expenditure allocation with economic growth as a moderator (An empirical study of regency/city governments in Bali Province, 2019–2023). International Journal of Management Research and Economics, 3(2), 251–262. https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v3i2.3389

Arifuddin, I., Sapar, & Salju. (2021). Pengaruh pendapatan dan anggaran belanja terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah Kota Palopo. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, 6, 1–27.

Aulia, A. N., Hidayati, T., Mubarok, A., & Arifin, M. Z. (2026). Analysis of the realization of the regional revenue and expenditure budget of East Barito Regency in 2023–2024 in supporting regional financial efficiency. JAM-EKIS: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Islam, 9(2), 657–666.

Chairunnisa, L. L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Analisis penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN), 11(2), 31–45.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). Sage Publications.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). Data transfer pusat ke daerah Kota Serang dan anggaran pendapatan daerah Kota Serang tahun 2024. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Firanti, N., & Biduri, S. (2024). Tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia tidak lengkap tanpa partisipasi masyarakat. Journal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat, 1(3).

Hanifah, Z., Frinaldi, A., Putri, N. E., & Asnil. (2025). Analisis strategi optimalisasi pendapatan asli daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal di Kabupaten Padang Pariaman. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(4).

Hasanah, N., Masdar, R., Furqan, A. C., & Tenripada, T. (2025). Empirical evidence on the role of local own-source revenue in strengthening fiscal independence of Indonesian local governments. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 9(4), 2950–2963. https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2788

Inzany, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, S., Purwantoro, S. A., & Prihantoro, K. (2022). Sistem informasi pemerintahan daerah dalam perencanaan pendapatan dan belanja daerah. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(10), 3573–3588. https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1462

Kamala, J., Salsa, S. A., Nurilawati, & Pangestoeti, W. (2025). Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam meningkatkan pelayanan publik. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 3(7), 120–128.

Kebijakan Umum APBD Kota Serang. (2024). Kebijakan umum APBD Kota Serang tahun anggaran 2024. Pemerintah Kota Serang.

Mahardika, E. P., & Fauzan. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017–2019). Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 11(1).

Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Andi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). Sage Publications.

Mulanda, D., & Adnan, M. F. (2023). Implementasi teori good governance dalam meningkatkan kinerja administrasi publik. FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 4(2).

Musfirati, A., & Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana keistimewaan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi, 5(1), 20–36.

Nurjanah, R., Triantoro, A., & Hardiana, R. D. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(1), 2348–2361. https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.216

Nurvaliza, S., & Putra, G. H. (2024). Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi, 4(2), 739–747.

Pratama, M. M., Adha, A., Hartini, D. S., Dwi, G., & Rahmawati. (2025). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi periode 2016–2024. Jurnal Penelitian Nusantara, 1(3), 29–39.

Pratista, R. A., Putri, S. A., Cahyani, S. A., Fismawati, W., & Ramadhani, O. S. (2025). Strategi optimalisasi pendapatan asli daerah melalui diversifikasi sumber pendapatan di Pemerintah Kota Malang. Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan, 5(2), 122–134. https://doi.org/10.55606/jimek.v5i2.6057

Purwaningsih, M. R. (2022). Pelaksanaan musrenbang daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif. Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan, 6(1).

Rahman, Z., & Laere, P. (2021). Analisis kemandirian dan kemampuan keuangan dalam mendukung otonomi daerah di Kabupaten Bone Bolango. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 8(2), 228–237.

RRI. (2024). Kemandirian anggaran Kota Serang hanya 20 persen. Radio Republik Indonesia.

Sa'bani, S. R., Saputro, G. E., & Suwito. (2025). The role of local governments in optimizing regional original revenue: A role theory perspective on fiscal autonomy. PPSDP International Journal of Education, 4(1), 347–361. https://doi.org/10.59175/pijed.v4i1.412

Santoso, E. B., Prasetyo, A., & Gaol, L. L. (2024). Penguatan tata kelola keuangan publik melalui partisipasi masyarakat dan transparansi informasi. Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang, 4(1), 126–140.

Sherly, E. A., Maura, M. S., & Suhatmi, E. C. (2025). Pengaruh transparansi anggaran, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas keuangan daerah. LABEL: Law, Accounting, Business, Economics, and Language, 2(1), 406–411.

Shobiha, T. D., Zuhroh, D., Wasesa, T., Sutini, & Wiratna. (2025). Dampak pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat terhadap peningkatan belanja daerah di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018–2022. Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi, 4(22), 867–884.

Sulistiawan, A., Ispriyarso, B., & Ristyawati, A. (2022). Bentuk dan mekanisme perencanaan keuangan daerah yang partisipatif guna mewujudkan akuntabilitas publik. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(2).

Susilo, Putri, R. N. H., Simangunsong, F. Y., & Labiba, M. (2024). Intergovernmental transfer and local own-source revenue on capital expenditure. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 13(3), 370–379.

Triyassari, A., & Sambharakreshna, Y. (2024). Value for money dan rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK), 7(2), 259–278.